**PENERAPAN MEDIASI PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESORT
KOTA PEKANBARU**

Oleh : Aisy Zainindra

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat : Jln. Sisingamangaraja gg memutui, Bangkinang Kota

Email :aisyzainindra08@gmail.com- Telepon : 081266472074

ABSTRACT

This criminal law perspective in Indonesia is already familiar with the settlement of criminal cases outside the court, or often called Penal Mediation. This is sought to uphold Restorative justice by balancing the actions of the perpetrators of criminal acts with the consequences. Reference for the implementation of penal mediation refers to Pancasila, the 1945 Constitution (UUD), Law number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP), Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. Police Chief's Letter No. B / 3022 / XXI / 2009 / SDEOPS which explains that cases that have been resolved through Alternative Dispute Resolution in order to avoid.

Penal Mediation is a legal breakthrough applied by law enforcement officials with reference to the process of Restorative Justice approach, bearing in mind that there is an objective to reconcile victims of crime with mediators through mediation in order to settle cases, return and repair damage and losses caused by a criminal case. Victims and perpetrators are expected to find and reach the best solutions and alternatives to resolve the case. This research uses the typology of sociological legal research or also called non-doctrinal legal research, which is more specifically about the effectiveness of law. In this study the authors used the descriptive nature of the study, because the authors describe how the application of penal mediation to acts of abuse in the Pekanbaru.

The results of research conducted by the author are, firstly, the implementation of the application of the mediation of the penalties against the criminal acts of persecution, then to find out what legal consequences are caused and what obstacles occur when the application of the mediation of the penalties. The resort is obliged to determine which cases of abuse are entitled to be mediated.

Keywords: Penal Mediation - Criminal Acts of Abuse

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya asas kesalahan atau asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana. Atas dasar asas ini seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana. Dipidananya orang ditentukan oleh kesalahan orang itu terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹ Tindak pidana adalah suatu perbuatan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana² Ketika sipembuat tindak pidana benar-benar tidak dapat disalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya, maka pidana tidak dapat dijatuhkan walaupun tindak pidana sudah dilakukannya. Karena menurut Moeljatno, perbuatan pidana (tindak pidana) hanya menuntut kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sedangkan penjatuhan pidana tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan.³

¹A. Fuad Usfa Dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, Hlm.45.

² Yvonne Isom, A Critical Examination Of Gender Difference In Drugselling For Non-Violent Street Leveldrug Seller, *Jurnal Westlaw And Criminal Justice*, diakses Melalui [Http//Fh.Unri.Ac.Id/Index.Php/Perpustakaan/#](http://Fh.Unri.Ac.Id/Index.Php/Perpustakaan/#), Tanggal 1 November 2019.

³Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: RinekaCipta, 2002, hlm. 165.

Perspektif hukum pidana di Indonesia ini sudah mengenal penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, atau sering disebut Mediasi Penal. Hal ini diupayakan untuk menegakkan keadilan Restorative dengan menyeimbangkan perbuatan pelaku tindak pidana dengan akibat yang ditimbulkan. Acuan pelaksanaan mediasi penal merujuk pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD), Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat Kapolri No. B / 3022/XXI/2009/SDEOPS yang menjelaskan bahwa perkara yang telah diselesaikan melalui Alternative Dispute Resolution agar tidak dilakukan proses hukum berikutnya. Pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana di Resor Pekanbaru menggunakan model mediasi penal.

Dalam penyelesaian tersebut sebenarnya Resor Kota Pekanbaru merupakan wadah yang memfasilitasi berjalannya mediasi penal, seharusnya penerapan mediasi penal seperti beberapa kasus tidak harus diterapkan mediasi penal, sebab adapun kasus itu merupakan penganiayaan berat sesuai dengan Pasal 354 dan Pasal 355 KUHP yaitu penganiayaan berat yang harus dijatuhi hukuman 8-12 tahun kurungan dan seharusnya tidak ada mediasi terhadap kasus tersebut, disini tampak jelas bahwa penerapan dari mediasi penal di resor pekanbaru masih

belum sepenuhnya sesuai walaupun mediasi penal atas kesepakatan kedua belah pihak, tetapi harus diperhatikan seperti apa kasus yang bisa diselesaikan melalui mediasi penal.

Berdasarkan ketimpangan antara *dashholen* dan *dassein* diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “***Penerapan Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*** “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana akibat hukum dalam proses penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Hambatan apa yang ditemukan dalam proses penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tersebut diatas. Maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana

penganiayaan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui akibat hukum kepastian hukum dalam proses penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui Hambatan yang ditemukan dalam proses penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

2. Kegunaan Penelitian

Tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka diharapkan beberapa kegunaan di dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan permasalahan mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan di resor pekanbaru.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Pidana secara khususnya dalam hal mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan di resor pekanbaru.

- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Istilah teori pidana berasal dari Inggris *condemnation theory*. Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Teori pidana merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis alasan negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.⁴

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pidana" diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan

⁴ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 149.

serupa.⁵ Pompe berpendapat menitikberatkan pidana pada pembalasan tetapi tindak pidana itu harus pula bermaksud mempertahankan ketertiban masyarakat agar kepentingan umum dapat diselamatkan.⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁷

Pengertian penegakan hukum diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dalam oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan peyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁸

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan

⁵ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 21.

⁶ Tolib Setiady, *ibid*, hlm. 59.

⁷ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988). hlm 32

⁸ Harum M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas. Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegakkan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.⁹

Jadi teori ini mengatakan bahwa faktor penghambat dalam penegakan itu terbagi 5, yang salah satunya yaitu faktor hukum sendiri, dimana hukum itu kurang tegak sesuai dengan semestinya, masih terjadi kesalahan dalam penerapan aturan-aturan yang seharusnya ditegakkan, dan faktor masyarakat, yang mana masyarakat banyak tidak tau syarat-syarat apa saja yang ditetapkan untuk jenis penganiayaan yang bisa dimasukkan kedalam kategori mediasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah pelaksanaan, atau biasa

⁹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm.55

sering didengar dengan penerapan.¹⁰

2. Tindak Pidana Penganiayaan adalah secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan.¹¹

Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.¹²

3. Mediasi Penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum). Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana

¹⁰ Andini T.Nirmala dan Aditya A.Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2003, hlm.160.

¹¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

¹² Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174.

dengan alasan-alasan tertentu.¹³

4. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁴
5. Delik adalah Kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab sedangkan delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang

masalah yang diteliti.¹⁶ Penelitian ini lebih spesifik kepada efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.¹⁷

2. Sumber Data

Data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.¹⁸ Didalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan. Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui wawancara dilapangan mengenai hal-

¹³ Romli Atmasasmita, "Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Makalah disampaikan pada Seminar Hubungan Polisi – Jaksa: Menuju Integrasi*, di Auditorium Bumi Putera –Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Indonesia, Depok, 2008.

¹⁴ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia

¹⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.102.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 42.

¹⁷ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010, hlm. 116.

¹⁸ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2011, hlm 12.

hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli terkait dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) **Bahan hukum**

primer, yaitu data primer yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri yang langsung dicatat oleh peneliti dari sumber data yang diteliti sesuai dengan permasalahan.

Bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu terdiri dari : norma-norma hukum, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari penjajahan yang sampai saat ini masih berlaku.¹⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

a) Undang-Undang Dasar Neagar Republik

Indonesia Tahun 1945;

b) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan huku primer.²⁰ Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti.

3) **Bahan Hukum Tertier**

yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada bahan hukum tersier ini juga dapat digunakan bahan non hukum seperti, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm, 114.

²⁰ Bambang Sugono, *Op.cit*, hlm 114.

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode :

a. Wawancara, dilakukan dengan cara menentukan jumlah populasi, lalu dari populasi tersebut diambil beberapa sampel (melalui teknik purposive sampling);

b. Kuisioner, kuisioner dibagikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Riau;

c. Studi pustaka, baik melalui buku maupun data dari internet yang berkaitan dengan tulisan ini..

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.²¹ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh bahan-bahan

yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan yaitu :

a. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Secara Mediasi Penal Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru”

b. Wawancara, metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan pada responden. Wawancara nonstruktur, yaitu wawancara bebas menanyakan pertanyaan pada responden.

c. Kepustakaan yaitu pencarian data, naskah-naskah, dokumen-dokumen, atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan. Dalam menarik kesimpulan penulis

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.77.

menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.²²

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Poerdarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.²³ Tirtamidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut, menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁴ Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²⁵

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar tidak memihak dan netral berkerja dengan baik yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.77.

²³ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48.

²⁴ Tirtamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, Jakarta, 1995, hlm.174.

²⁵ Rustan, *Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan*, Dua Satu Press, Makasar, 2014, hlm.80.

²⁶ Sudiarto dan Zaeni Asyhadle, *Mengenai Arbitrase*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.16.

dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁷

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian darat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 50-50 meter di atas permukaan laut.

B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Pekanbaru

Polresta Pekanbaru berdiri pada Tahun 1975. Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang bermarkas di

jalan Ahmad Yani No 11 Pekanbaru. Di utara, wilayah hukum polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, diselatan dengan Kampar, dibarat dengan Kampar dan di Timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 KM atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.

Polresta Pekanbaru memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dikota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 Polsek (Kepolisian Sektor), antara lain: Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan Polsek kawasan Pelabuhan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Terjadinya tindak pidana merupakan suatu peristiwa yang didalamnya terjadi pelanggaran oleh seseorang terhadap hak dan kepentingan orang lain yang mengakibatkan kerugian. Terjadinya kejahatan atau tindak pidana selalu melibatkan dua pihak yakni pelaku kejahatan atau tindak pidana dan korban dari tindak pidana itu. Penyelesaian pada konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

dengan jalur litigasi dan non litigasi, jalur litigasi merupakan penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi merupakan penyelesaian masalah diluar pengadilan. Hal ini diupayakan untuk keadilan restorative dengan menyeimbangkan perbuatan pelaku tindak pidana dengan akibat yang ditimbulkan, mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan.²⁸

Berdasarkan teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan dan pemidanaan memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan.

Berkaitan dengan tujuan kemanfaatan dalam pemidanaan, bahwa pidana sama sekali tidak memiliki nilai pembenaran apapun bila sematamata dijatuhkan untuk sekedar menambah lebih banyak penderitaan atau kerugian pada masyarakat. Beranjak dari pemikiran Bentham maka penjatuhan hukuman melalui pidana yang berupa memberikan

pembalasan penderitaan pelaku bukanlah hal yang utama. Karena pada prinsipnya hukum pidana berlaku sebagai ultimum remedium berarti hukum pidana merupakan sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Sesuai dengan mediasi penal yang mana pada dasarnya konteks mediasi penal puncaknya diharapkan dapat menekan penumpukan perkara di pengadilan. Dalam perkembangannya, penyelesaian perkara diluar pengadilan maka tidak semua perkara pidana dapat dilakukan melalui dimensi mediasi penal. penerapan kesepakatan damai melalui mediasi penal yang berkedudukan untuk menghentikan proses perkara pidana dengan jalan menyelesaikannya diluar pengadilan sebenarnya belum diakui secara penuh dalam KUHP dan KUHP.

B. Akibat Hukum Dalam Proses Penerapan Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan

²⁸ Arif Septria Hedra Saputra, "Penerapan Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Satreskrim Polsek Lasem", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1.No.1 Maret 2018.

hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat hukum bisa timbul dalam permasalahan ranah hukum pidana seperti mediasi penal. Mediasi Mediasi penal merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkan dimensi bersifat privat ke dalam ranah hukum publik. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 123 responden mendeskripsikan bahwa setuju dalam kebijakan legislasi dan aplikasi masa mendatang diformulasikan norma mediasi penal (89,43%). Akan tetapi, terhadap dasar yuridis pengaturannya responden bersikap variatif yaitu diatur dalam KUHP (18,70%), KUHAP (42,28%), UU tersendiri (11,40%), peraturan di bawah UU (4,07%) dan Peraturan MA (9,75%) dan dilakukan oleh Kepolisian (41,46%), Kejaksaan (12,20%) dan Pengadilan (40,65%).²⁹

Berdasarkan teori penegakan hukum, yang mana penegak hukum antara lain kepolisian yang merupakan subsistem langsung yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana. Setiap permasalahan yang terjadi tidak harus diselesaikan melalui proses peradilan karena masih ada cara-cara lain yaitu musyawarah untuk

mufakat. Penyelesaian perkara melalui mediasi penal merupakan cara penyelesaian yang efektif dengan melibatkan pihak keluarga pelaku dan keluarga korban serta tokoh masyarakat. Dalam prakteknya sebagai upaya awal kepolisian seharusnya mempunyai peran aktif berupa tawaran menyelesaikan perkara melalui mediasi. Pelaksanaan mediasi itu sendiri didasarkan pada keinginan para pihak dalam upaya dalam tercapainya kesepakatan *winwin solution* melalui mediasi penal.

Apabila penerapan mediasi penal yang berakibat dengan penghentian proses perkara pidananya dikaitkan dengan teori penegakan hukum maka penghentian proses perkara tersebut bertentangan dengan apa yang seharusnya diberlakukan.

C. Hambatan Yang Ditemukan Dalam Proses Penerapan Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasinya

Mediasi penal sebenarnya belum memiliki payung hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Yang ada hanya beberapa regulasi tersirat, yang membuka kemungkinan mediasi. Buka spesifik mediasi penal. Kalaupun ada Pasal 82 KUHP, pasal ini belum menggambarkan secara tegas kemungkinan penyelesaian damai antara pelaku pidana dengan korban. Tetapi dalam praktik, sudah sering

²⁹ Lilik Mulyadi, " MEDIASIPENAL DALAMSISTEMPERADILAN PIDANA INDONESIA: PENGKAJIAN ASAS,NORMA,TEORI DAN PRAKTIK", *Yustisia* Vol.2 No.1 Januari-April2013.

diterapkan hakim. Mungkin karena ini dipandang sebagai cara terbaik menyelesaikan masalah.

Bahwa pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek korban maupun tersangka yang telah bersepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut hanya pada tingkat penyidikan dan tidak melanjutkan pada tahapan selanjutnya. Dalam penegakan hukum itu, sebenarnya penegak hukum dapat melakukan tindakan berupa pengesampingan perkara atau menyelesaikannya tanpa melanjutkan ke tahap selanjutnya (penyelesaian di luar pengadilan).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan diskresi kepolisian (*discretion*). Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).³⁰

PENUTUP

³⁰ Reyner, "ALTERNATIF MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA", *Jurnal Hukum Adigama*, Tarumanegara.

A. Kesimpulan

1. Bahwa Implementasi mediasi penal terhadap tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Pekanbaru, sudah terwujud akan tetapi implementasi mediasi penal ini dilakukan kurang teliti dalam melihat tindak pidana apa saja yang boleh dimediasi dan yang tidak boleh. Sebab tujuan dari mediasi ialah untuk mencapai kata damai, namun jika semua tindak pidana dimediasi terkhusus tindak pidana berat, maka efek jera tidak berlaku bagi mereka. cabai apakah sipelaku bisa dikenakan pasal 351 ayat (1) KUHP dan ditahan.
2. Dalam beberapa perkara pidana penganiayaan memang tidak mudah untuk menentukan apakah sebuah penganiayaan masuk dalam kategori Penganiayaan Biasa dengan Penganiayaan Ringan. Hal ini nampaknya perlu kita kaji lebih dalam, mengingat dalam beberapa perkara terkadang Penyidik (Kepolisian) tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh korban. Khususnya berkaitan dengan ditahan atau tidaknya seorang pelaku Penganiayaan, mengingat jika si pelaku dikenakan pasal 351 (1) KUHP maka hal tersebut masuk dalam unsur penganiayaan biasa dimana pelaku harus ditahan, jika pelaku dikenakan pasal 352 (1) KUHP maka hal tersebut masuk dalam unsure

penganiayaan ringan sehingga pelaku tidak bisa ditahan.

3. Hambatan dalam melakukan mediasi penal terkadang terjadi ketidakjujuran antar korban yang mengakibatkan lambat atau salahnya penerapan mediasi terhadap kasus tertentu, tindak pidana penganiayaan merupakan delik murni yang mana perbuatannya harus di laporkan dan diadukan ke pihak yang berwenang. Namun, dalam proses penerapan mediasi beberapa orang memilih bungkam

B. SARAN

1. Penyidik harus lebih teliti dalam menyelidiki/mengintrogasi korban/tersangka dalam kasus pidana tersebut (penganiayaan) sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan, memang benar mediasi bisa di capai melalui kesepakatan kedua belah pihak, tetapi terkadang si salah satu korban merasa terintimidasi makanya ia memilih mediasi saja yang seharusnya kasus atau tindak pidana tersebut tidak sesuai syarat untuk di mediasi
2. Seharusnya kesepakatan harus sesuai antara korban dan kepolisian yang menangani kasus tersebut, dan aturan-aturan hukum nya harus dipertegas lagi sesuai aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan, apabila tindak

pidana penganiayaan tersebut berat maka tidak bisa pihak kepolisian memutuskan untuk penerapan mediasi, jika itu terjadi akan menimbulkan masalah hukum yang baru.

3. Bagi pihak korban/tersangka harus jujur dalam memberikan keterangan agar tidak membingungkan para penyidik dalam memproses suatu kasus (pidana). Dan tidak adanya unsur keterpaksaan dalam melaporkan ke kepolisian, serta dapat memudahkan dalam melakukan penyidikan langsung dan mengumpulkan bukti serta menghadiri saksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asmar, Lanka dan Samsul Fadli, 2009, *Metode Penemuan Hukum Pembuktian Elektronik dan CCTV Pada Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif fadillah, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta.
- Djisman, Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- HS, Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas*

- dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta.
- M, Husen, Harum, 1990, *Kejahatan dan Penegekan hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ketujuh. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Bardar Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 2005 *Asas-asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Faisal, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung
- Lilik Mulyadi, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia., *jurnal Yustisia*. Vol. 2 No 1, April 2013, hlm 2.
- Romli Atmasasmita, ”Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Makalah disampaikan pada Seminar Hubungan Polisi – Jaksa: Menuju Integrasi*, di Auditorium Bumi Putera –Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Indonesia, Depok, 2008.
- Sahuri Lasmadi, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Universitas Jambi*, hlm.6
- Yvonne isom, A Critical Examination of gander difference in drugselling for non-violent street level drug seller, *jurnal westlaw and criminal justice*, diskus melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/erpustakaan/#>, tanggal 1 november 2019
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia